RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2023

LAMPIRAN XLIX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

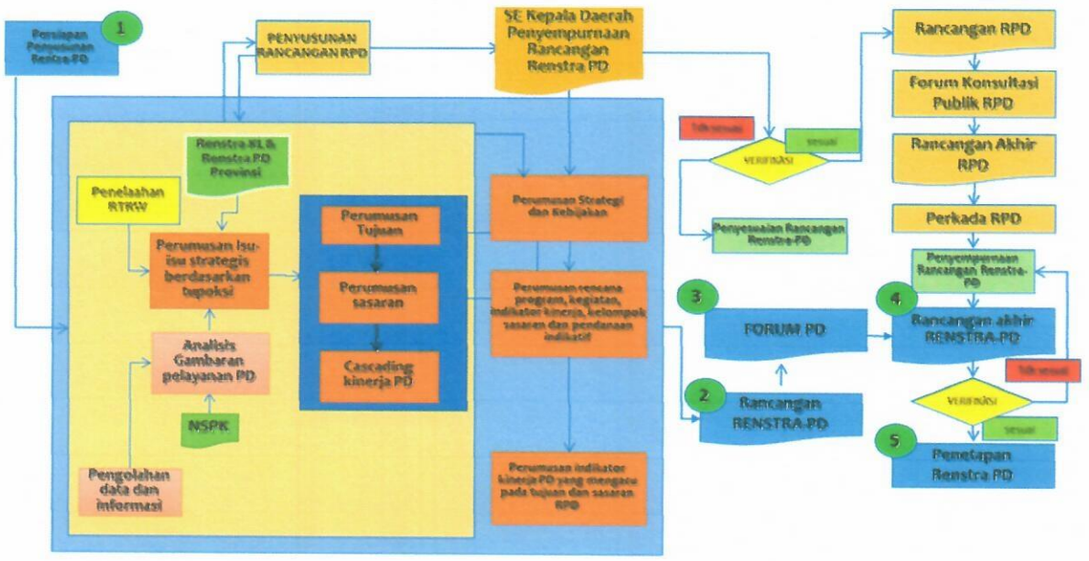
Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk

Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan

Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah

dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan;

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;

3.2. Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;

4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Wilangan memiliki luas wilayah 4.913.828 Ha yang terdiri dari kawasan permukiman dan pekarangan seluas 273.575 Ha, lahan kering seluas 129.066 Ha, sawah seluas 1.171.341 Ha dan lainnya seluas 3.312,9 Ha.

Kecamatan Wilangan memiliki batas wilayah :

Utara : Kec. Rejoso,

Timur : Kec. Bagor,

Selatan : Kec. Sawahan,

Barat : Kab. Madiun

Secara administratif Kecamatan Wilangan terdiri dari 6 desa yaitu :

No	Desa	Kecamatan (Km)	Pasar (Km)
1.	Sudimoroharjo	14	0,3
2.	Ngadipiro	5,7	0,2
3.	Wilangan	0,3	
4.	Mancon	3,8	
5.	Ngudikan	5,5	
6.	Sukoharjo	7,0	

Data Demografi Penduduk di Kecamatan Wilangan

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan
1	Sudimoroharjo	4045	4137
2	Ngadipiro	1682	1938
3	Wilangan	2637	2172
4	Mancon	2898	2838
5	Ngudikan	2542	2405
6	Sukoharjo	1958	2127
	Jumlah Penduduk	15762	15617

Sumber data : Profil Kependudukan Kecamatan Wilangan Tahun 2022

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Wilangan.

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

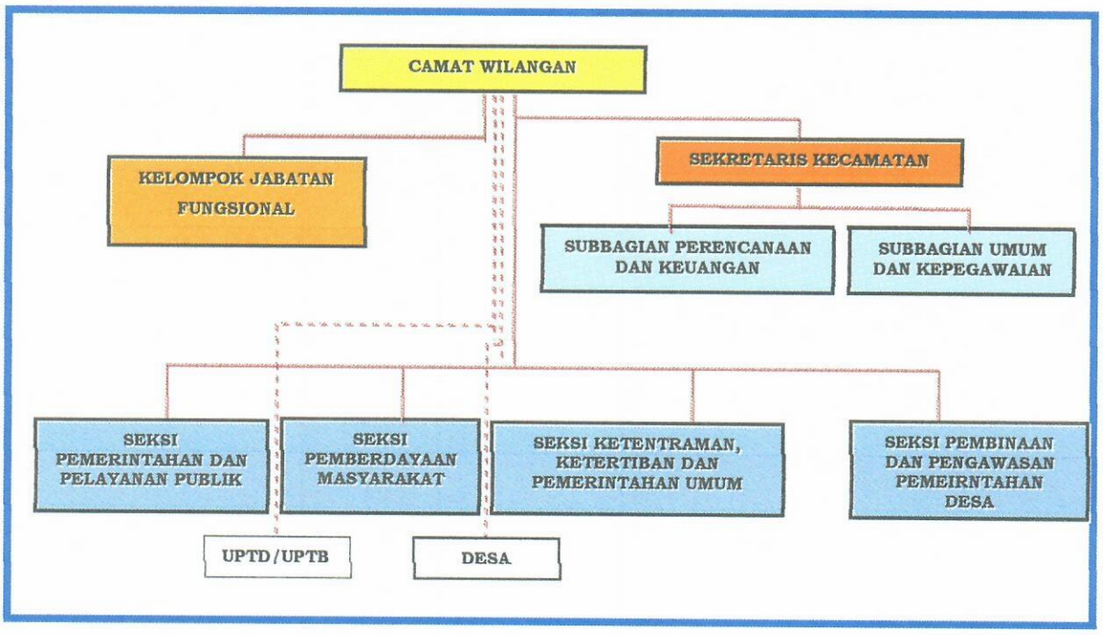
   a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
   c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
   e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
   f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
   h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan

i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3. Struktur Organisasi

Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Wilangan adalah Kecamatan dengan Tipe A.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Wilangan adalah sebagai berikut:

2.1.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Wilangan sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 6 (enam) jabatan struktural dan 2 (dua) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 10 (sepuluh) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kecamatan Wilangan
Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	3
4.	Kasubbag	1
5.	Staf/PNS	8
6.	THL	8
Jumlah		22

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Wilangan sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kecamatan Wilangan
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina	IV/b	-
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	3
4.	Penata	III/c	3
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	-
6.	Penata Muda	III / a	2
7.	Pengatur Tk.I	II/d	3
8.	Pengatur	II/c	-
9.	Pengatur Muda	II/a	1
Jumlah			13

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Wilangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Wilangan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2023

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	1
2.	S1	7
3.	D3	1
4.	SMA	5
5.	SMP	0
	JUMLAH	14

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
   - Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
     - 1 unit Daihatsu Panther Tahun 2013
   - Roda dua sebanyak 3 (tiga) Unit yaitu Honda Win tahun 1997, Honda Supra X125 Tahun 2007 dan Yamaha Vixion Tahun 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
   - Meja Kerja : 19 buah
   - Meja layanan : 5 buah
   - Kursi : 87 buah
   - Kursi Tunggu : 3 buah
   - Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
   - Komputer e-KTP : 2 (dua) unit
   - Laptop : 5 (lima) unit
   - Mesin Ketik : 1 (satu)
   - Printer : 5 (tiga) unit
   - Scanner : 1 (dua) buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Wilangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah
2. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
4. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
5. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan
6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah						98	98			86,52	86.17			88.29	87.93
2	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan						99	99			36,80	97.98			37.17	98.97
3	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan						99	99			81,75	95.68			82.58	96.65
4	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan						99	99			6,46	94.95			6.53	95.91
5	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan						99	99			34,54	99.37			34.89	100
6	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						99	99			4,93	80.11			4.98	80.92

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	SEBELUM PERUBAHAN														
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97.920.000	101.175.000			88.668.769	96.785.576			90,55	95,66				
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	108.500.000	90.740.000			107.734.800	90.415.324			99,29	99,64				
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.500.000	2.000.000			3.470.000	2.000.000			99,14	100,00				
4.	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	325.609.000	82.375.000			310.482.150	81.520.000			95,35	98.96				

5	Program Pembinaan Desa/Kelurahan		19.470.000				19.450.000				99.900				
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	23.500.000				23.500.000				100					
	SESUDAH PERUBAHAN														
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.811.892.670	2,272,229,750			1,619,852,013	1,957,934,459			86.52%	86.17%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			48.000.000	128,635,100			21,033,350	126,033,469			36.80%	97.98%		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			108.207.600	62.661.300			91,130,100	59,956,140			81.75%	95.68%		

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			18.737.500	22.872.800			825,000	21,717,600			6.46%	94.95%		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			11,147,800	22.890.100			3,850,000	22,745,400			34.54%	99.37%		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			13,950,000	235.613.000			687,500	188,761,320			4.93%	80.11%		

Sumber: SIPD Kecamatan Wilangan 2021-2023

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.1., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target ada yang belum terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Wilangan.

Sedangkan pada table 2.2., kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2021, rasio antara anggaran dan realisasi ada beberapa Program dengan predikat Sangat Rendah. Hal ini bisa terjadi pada masa awal COVID-2019, dimana berbagai kegiatan banyak yang dilakukan pembatalan atau tidak dilaksanakan dalam rangka meminimalisir dan mencegah adanya penularan COVID-2019.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Wilangan

No	Desa	PAUD/TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar/Pamong Belajar	Perpustakaan
1	Sudimoroharjo	3	5	1	-	-	2	-	-	1
2	Ngadipiro	4	3	-	-	-	-	-	-	1
3	Wilangan	5	4	1	1	-	-	-	-	1
4	Mancon	3	3	2	-	-	1	-	-	6
5	Ngudikan	2	2	1	-	-	-	-	-	1
6	Sukoharjo	3	4	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Wilangan

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	Sudimoroharjo	-	-	-	1	1	-
2	Ngadipiro	-	-	-	1	1	2
3	Wilangan	-	-	-	-	1	-
4	Mancon	-	1	-	-	1	1
5	Ngudikan	-	-	-	1	-	-
6	Sukoharjo	-	-	-	-	1	1

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Wilangan

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	Sudimoroharjo	35	16	9	9	3	1	32
2	Ngadipiro	21	4	7	9	2	1	35
3	Wilangan	36	8	9	8	4	1	28
4	Mancon	33	13	9	11	4	1	41
5	Ngudikan	28	9	9	9	2	1	32
6	Sukoharjo	25	12	7	12	4	1	39
	JUMLAH	178	62	50	58	19	6	207

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Wilangan

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1	Sudimoroharjo	1	-	1	-	1	-
2	Ngadipiro	1	-	1	-	1	-
3	Wilangan	1	1	-	-	1	-
4	Mancon	1	-	-	-	1	-
5	Ngudikan	1	-	-	-	1	-
6	Sukoharjo	1	-	-	-	1	-
	JUMLAH	6	1	2	-	6	-

Sumber Data : Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tabel Data Infrastruktur Desa di Kecamatan Wilangan

No	Desa	Jalan (km)	Jembatan (unit)	Drainase (km)	Embung
1	Sudimoroharjo	145	15	16	-
2	Ngadipiro	8	5	8	-
3	Wilangan	10	11	8	-
4	Mancon	65	7	20	1
5	Ngudikan	15	7	10	-
6	Sukoharjo	10	5	8	-
	JUMLAH	253	50	70	1

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Wilangan

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	Sudimoroharjo	-	-	1	1
2	Ngadipiro	2	-	1	1
3	Wilangan	-	-	1	1
4	Mancon	-	-	1	1
5	Ngudikan	1	-	1	1
6	Sukoharjo	1	-	1	1

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Wilangan Tahun 2022

No	Desa	Anjal/gepeng	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkalahian
1	Sudimoroharjo	-	-	-	-	-	-	1
2	Ngadipiro	-	-	-	-	-	-	-
3	Wilangan	-	-	-	-	-	-	3
4	Mancon	-	-	-	-	-	-	2
5	Ngudikan	-	-	-	-	-	-	-
6	Sukoharjo	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Wilangan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Konflik social di Kec. Wilangan
	Kec. Wilangan	-

Sumber Data : Seksi Trantib dan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Wilangan Tahun 2022

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Kelurahan (Jumlah Dokumen)	Laporan Keuangan Kelurahan (Jumlah Dokumen)

1	Sudimoroharjo	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ngadipiro	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Wilangan	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Mancon	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Ngudikan	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Sukoharjo	1	1	1	1	1	1	1	1
	JUMLAH	6	6	6	6	6	6	6	6

Sumber Data : Seksi BinwasDes

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Wilangan Tahun 2022

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1	Adminduk capil	268
2	Perijinan	-
3	Administrasi lainnya	220

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Wilangan Tahun 2022

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1	Kecamatan Sehat	1
2	Kecamatan Layak Anak	1

3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	1
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	2
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	4
6	Kemiskinan	2

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Wilangan adalah masyarakat dan desa di Kecamatan Wilangan.

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Wilangan dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas:

a. Koordinasi dan fasilitasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Wilangan menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Wilangan;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Wilangan yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public masih kurang • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Wilangan, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041, Kecamatan Wilangan memberikan dukungan dalam penataan ruang daerah melalui kegiatan:

a. Pengembangan Kawasan

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangakt Daerah khususnya Kecamatan Wilangan, yang ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Wilangan, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR),* maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Wilangan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wilangan dalam 3 (tiga) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Wilangan adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan*, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan		Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai	69,09	70	72	74
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Nilai	78	82	84	86
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	%	N/A	80	82	84

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendalu		14/4/23
2.	Kasubbag PK		14/4/2023
3	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah dan Peta Proses Bisnis

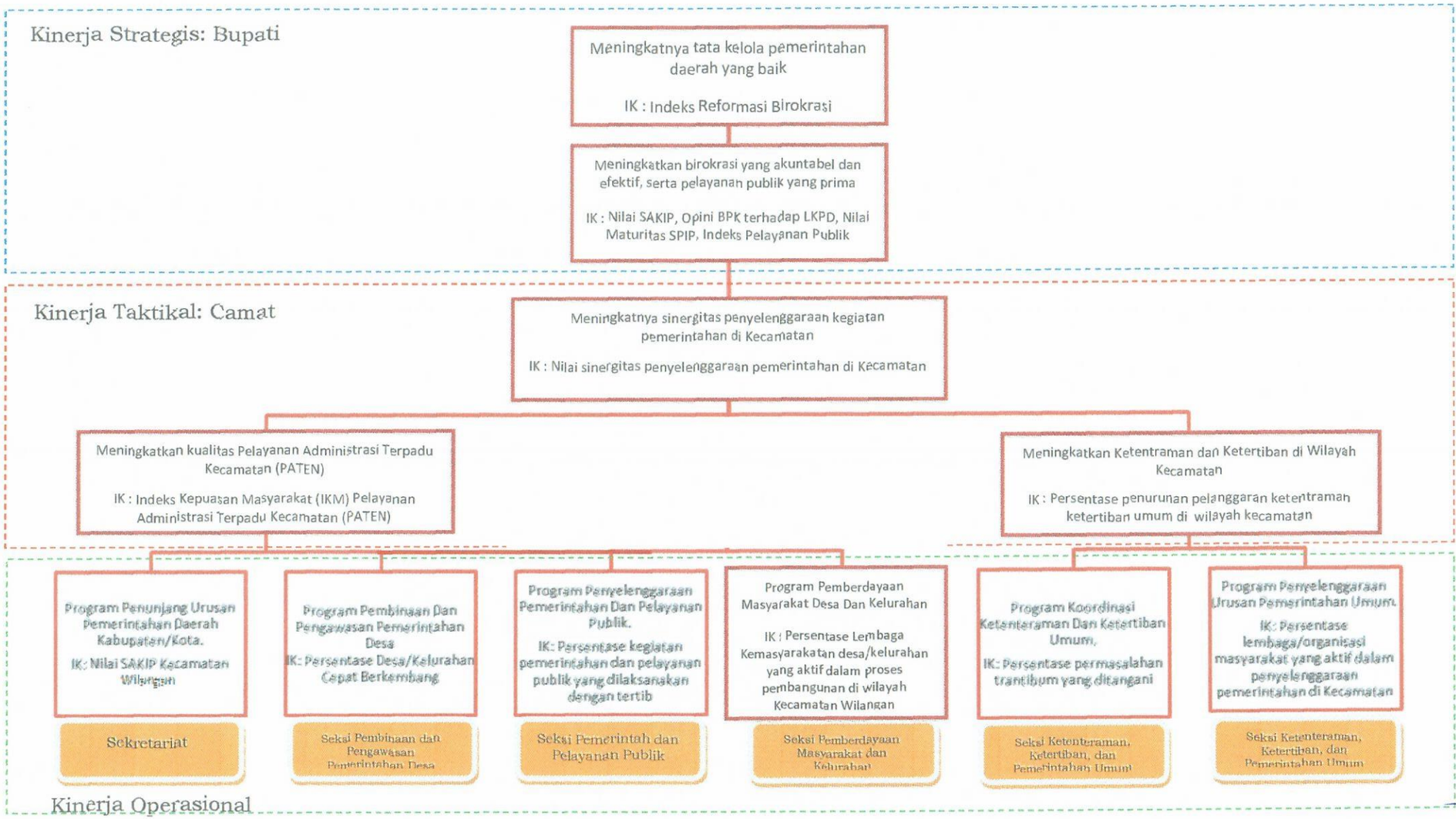
Berdasarkan tabel 4.1. diatas, dapat diketahui bahwa meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan adalah suatu hal yang harus dilakukan di Kecamatan dengan tujuan adalah untuk mengkonfirmasi dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja suatu pemerintahan di Kecamatan khususnya Kecamatan Wilangan dalam menjalankan pemerintahan.

4.3. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis

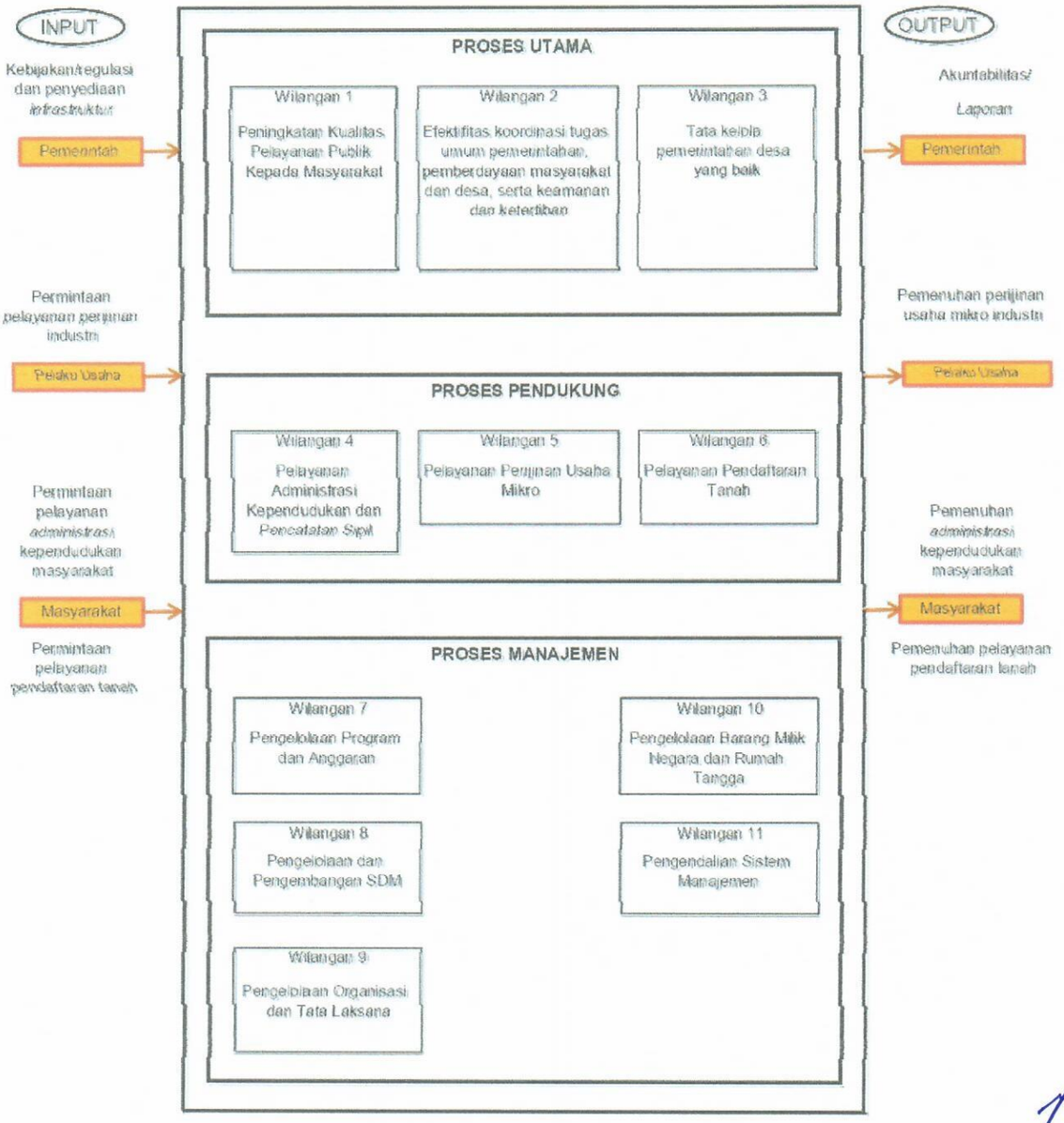
Kerangka Logis Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan table 4.1. diatas, dapat diketahui bahwa meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan adalah suatu hal yang harus dilakukan di Kecamatan dengan tujuan adalah untuk mengkonfirmasi dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja suatu pemerintahan di Kecamatan khususnya Kecamatan Wilangan dalam menjalankan pemerintahan:

Gambar: Diagram *Cascading* Kinerja Kecamatan Wilangan



PETA PROSES BISNIS KECAMATAN WILANGAN



BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Wilangan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Wilangan, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
- Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.

- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel			
Sasaran RPD : Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi kecamatan	▪ Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	▪ Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan ▪ Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah ▪ Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
	Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan	▪ Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa ▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan

			sinergi tiga pilar untuk menjaga *ketentraman*, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan ▪ Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan.
		▪ Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan	▪ Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa ▪ Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM ▪ Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.2. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Wilangan selama 3 tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Wilangan. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Wilangan akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 3 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel VI.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Wilangan

Kabupaten Nganjuk

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target kInerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*		*4*				*5*	*6*	*7*									*20*	*21*
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	***7.01***	***01***			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Nilai SAKIP Kecamatan***	***65.40***	***68***	***2,320,816,591***	***70***	***2,367,239,393***	***73***	***2,414,584,715***	***73***	***7,102,640,699***	***Sekretariat***	***Kec.Wilangan***
			7.01	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun***	***5 Dokumen***	***5 Dokumen***	***6,000,000***	***5 Dokumen***	***6,120,000***	***5 Dokumen***	***6,242,000***	***15 Dokumen***	***18,362,000***		
			7.01	*01*	*2.01*	*06*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*5 laporan*	*5 laporan*	6,000,000	*5 laporan*	6,120,000	*5 laporan*	6,242,000	*15 laporan*	18,362,000		
			7.01	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***33 Dokumen***	***33 Dokumen***	***1,892,134,800***	***33 Dokumen***	***1,929,977,496***	***33 Dokumen***	***1,968,576,165***	***99 Dokumen***	***5,790,688,461***		
			7.01	*01*	*2.02*	*01*	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*12 orang/bulan*	*14 orang/bulan*	1,884,934,800	*14 orang/bulan*	1,922,633,496	*14 orang/bulan*	1,961,086,165	*42 orang/bulan*	5,768,654,461		
			7.01	*01*	*2.02*	*05*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	*1 laporan*	*1*	3,000,00	*1*	3,060,00	*1*	3,121,00	*3*	9,181,00		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rongga		14/4/23
2.	Kabid PK		14/4/2023
3.	Kabid P3M		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target kInerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*		*4*				*5*	*6*	*7*									*20*	*21*
							Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		*laporan*	0	*laporan*	0	*laporan*	0	*laporan*	0		
			7.01	*01*	*2.02*	*07*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	*2 laporan*	*2 laporan*	4,200,000	*2 laporan*	4,284,000	*2 laporan*	4,369,000	*6 laporan*	12,853,000		
			7.01	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***1 dokumen***	***1 dokumen***	***16,500,000***	***1 dokumen***	***16,830,000***	***1 dokumen***	***17,166,600***	***3 dokumen***	***50,496,600***		
			7.01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	*1 paket*	*1 paket*	*16,500,000*	*1 paket*	*16,830,000*	*1 paket*	*17,166,600*	*3 paket*	*50,496,600*		
			7.01	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***20 dokumen***	***20 dokumen***	***158,026,391***	***20 dokumen***	***161,254,597***	***20 dokumen***	***164,521,950***	***60 dokumen***	***483,802,937***		
			7.01	*01*	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	*1 paket*	*1 paket*	4,000,000	*1 paket*	4,080,000	*1 paket*	4,161,000	*3 paket*	12,241,000		
			7.01	*01*	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	*5 paket*	*5 paket*	63,956,141	*5 paket*	65,302,947	*5 paket*	66,652,700	*15 paket*	195,911,787		
			7.01	*01*	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	*2 paket*	*2 paket*	5,000,250	*2 paket*	5,100,250	*2 paket*	5,202,250	*6 paket*	15,302,750		
			7.01	*01*	*2.06*	*06*	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	*2 dokumen*	*2 dokumen*	2,500,000	*2 dokumen*	2,550,000	*2 dokumen*	2,601,000	*6 dokumen*	7,651,000		
			7.01	*01*	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*10 laporan*	*10 laporan*	82,570,000	*10 laporan*	84,221,400	*10 laporan*	85,905,000	*30 laporan*	252,696,400		
			7.01	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan***	***6 unit***	***33 unit***	***56,685,100***	***6 unit***	***57,758,000***	***6 unit***	***58,914,000***	***45 unit***	***173,357,100***		
			7.01	*01*	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	*3 unit*	*25 unit*	16,529,300	*3 unit*	16,800,000	*3 unit*	17,136,000	*31 unit*	50,465,300		
			7.01	*01*	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	*3 unit*	*8 unit*	40,155,800	*3 unit*	40,958,000	*3 unit*	41,778,000	*14 unit*	122,891,800		
			7.01	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan***	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa***	***38***	***38***	***41,220,***	***38***	***42,044,***	***38***	***42,884,***	***114***	***126,148***		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Ket
1.	Kabid Pendataan		14/9
2.	Kasubag PK		14/9
3.	Kabid P3M		14/9
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target kInerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*		*4*				*5*	*6*	*7*									*20*	*21*
							Pemerintahan Daerah	***Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***laporan***	***laporan***	***000***	***laporan***	***000***	***laporan***	***000***	***laporan***	***,000***		
			7.01	*01*	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*2 laporan-*	*2 laporan-*	10,720,000	*2 laporan-*	10,934,000	*2 laporan-*	11,152,000	*6 laporan-*	32,806,000		
			7.01	*01*	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	*36 laporan*	*36 laporan*	30,500,000	*36 laporan*	31,110,000	*36 laporan*	31,732,000	*108 laporan*	93,342,000		
			7.01	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara***	***19 unit***	***19 unit***	***150,250,300***	***19 unit***	***153,255,300***	***19 unit***	***156,280,000***	***57 unit***	***459,785,600***		
			7.01	*01*	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	*4 unit*	*4 unit*	40,930,300	*4 unit*	41,748,900	*4 unit*	42,583,000	*12 unit*	*125,262,200*		
			7.01	*01*	2.09	*05*	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	*5 unit*	*5 unit*	4,000,000	*5 unit*	4,080,000	*5 unit*	4,161,000	*15 unit*	*12,241,000*		
			7.01	*01*	2.09	*06*	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	*6 unit*	*6 unit*	10,320,000	*6 unit*	10,526,400	*6 unit*	10,736,000	*18 unit*	*31,582,400*		
			7.01	*01*	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	*4 unit*	*4 unit*	95,000,000	*4 unit*	96,900,000	*4 unit*	98,800,000	*12 unit*	*290,700,000*		
			7.01	***02***			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib***	***95.83%***	***95.83 %***	***71,547,800***	***97.16 %***	***72,974,800***	***97.83 %***	***74,434,600***	***97.83 %***	***218,957,200***	***Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik***	***Kec.Wilayah***
			7.01	***02***	***2.01***		***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***5 laporan***	***5 laporan***	***40,200,000***	***5 laporan***	***41,000,000***	***5 laporan***	***41,820,000***	***15 laporan***	***123,020,000***		
			7.01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	*5 laporan*	*5*	40,200,0	*5*	41,000,0	*5*	41,820,0	*15*	123,020,		

PARAF MUSYAWARAH

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Pemdes		14/4/23
2.	Kasi Bina PK		14/4/2023
3	Kabid PBM		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target kInerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*		*4*				*5*	*6*	*7*									*20*	*21*
							dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		*laporan*	00	*laporan*	00	*laporan*	00	*laporan*	000		
			7.01	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana**	***5 kegiatan***	***5 kegiatan***	**9,500,000**	***5 kegiatan***	**9,690,000**	***5 kegiatan***	**9,883,800**	***15 kegiatan***	**29,073,800**		
			7.01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*5 dokumen*	*5 dokumen*	9,500,000	*5 dokumen*	9,690,000	*5 dokumen*	9,883,800	*15 dokumen*	29,073,800		
			7.01	***02***	***2.04***		***Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat***	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat***	***3 laporan***	***3 laporan***	***21,847,800***	***3 laporan***	***22,284,800***	***3 laporan***	***22,730,800***	***9 laporan***	***66,863,400***		
			7.01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*3 laporan*	*3 laporan*	21,847,800	*3 laporan*	22,284,800	*3 laporan*	22,730,800	*9 laporan*	66,863,400		
			7.01	***03***			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Wilangan**	***86.59%***	**86.59 %**	**54,456,400**	**87.00 %**	**55,544,600**	**88.00 %**	**56,656,400**	**88.00 %**	**166,657,400**	**Seksi Pemberdayaan Masyarakat**	***Kec.Wilangan***
			7.01	***03***	***2.01***		***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan***	***7 lembaga kemasyarakatn***	***7 lembaga kemasyarakatn***	***54,456,400***	***7 lembaga kemasyarakatn***	***55,544,600***	***7 lembaga kemasyarakatn***	***56,656,400***	***21 lembaga kemasyarakatn***	***166,657,400***		
			7.01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*7 lembaga kemasyarakatn*	*7 lembaga kemasyarakatn*	16,580,000	*7 lembaga kemasyarakatn*	16,911,600	*7 lembaga kemasyarakatn*	17,249,800	*21 lembaga kemasyarakatn*	*50,741,400*		
			7.01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang	*2 dokumen*	*2 dokum*	37,876,400	*2 dokum*	38,633,000	*2 dokum*	39,406,600	*6 dokum*	*115,916,000*		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pemdes		14/4/23
2.	Ka Subbag PK		14/4/2023
3	Kabid PSM		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target kInerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		4				5	6	7									20	21
							Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		*en*		*en*		*en*		*en*			
			7.01	***06***			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	***78.23%***	**78.23 %**	**201,774 ,500**	**78.50 %**	**205,808 ,500**	**80.00 %**	**209,923 ,500**	**80.00 %**	**617,506 ,500**	**Seksi Pembinaan dan pengawasan Desa**	***Kec.Wilangan***
			7.01	***06***	***2.01***		***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang***	***6 Desa***	***6 Desa***	***201,774 ,500***	***6 Desa***	***205,808 ,500***	***6 Desa***	***209,923 ,500***	***6 Desa***	***617,506 ,500***		***Kec. Wilangan***
			7.01	06	2.01	*02*	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*7 dokumen*	*7 dokumen*	160,364, 500	*7 dokumen*	163,571, 500	*7 dokumen*	166,843, 500	*21 dokumen*	490,779, 500		
			7.01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*2 dokumen*	*2 dokumen*	15,930,000	*2 dokumen*	16,248,000	*2 dokumen*	16,572,000	*6 dokumen*	48,750,000		
			7.01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	*3 dokumen*	*3 dokumen*	25,480,000	*3 dokumen*	25,989,000	*3 dokumen*	26,508,000	*9 dokumen*	77,977,000		
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	***Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan***	***7.01***	***04***			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	***94.95%***	**94.95 %**	**65,314, 800**	**95.00 %**	**66,621, 800**	**96.00 %**	**67,953, 800**	**96.00 %**	**199,890 ,400**	**Seksi Trantib dan Pemeirntahan Umum**	***Kec.Wilangan***
			7.01	***04***	***2.01***		***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan***	***14 laporan***	***14 lapora***	***65,314, 800***	***14 lapora***	***66,621, 800***	***14 lapora***	***67,953, 800***	***42 lapora***	***199,890 ,400***		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Rendahar		4/4/23
2.	PK		4/4/2023
3	PJM		4/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target kInerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun -1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										2024		2025		2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	*2*		*4*				*5*	*6*	*7*									*20*	*21*
								Ketenteraman dan Ketertiban Umum		***n***		***n***		***n***		***n***			
			7.01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*14 laporan*	*14 laporan*	65,314,800	*14 laporan*	66,621,800	*14 laporan*	67,953,800	*42 laporan*	199,890,400		
			7.01	***05***			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	***99.37%***	**99.37 %**	**85,890,000**	**99.50 %**	**87,607,000**	**100.00 %**	**89,359,000**	**100.00 %**	**262,856,000**	**Seksi Trantib dan Pemeirntahan Umum**	***Kec.Wilangan***
			7.01	***05***	***2.01***		***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	***7 Lembaga/Organisasi Masyarakat***	***7 Lembaga/Organisasi Masyarakat***	**85,890,000**	***7 Lembaga/Organisasi Masyarakat***	**87,607,000**	***7 Lembaga/Organisasi Masyarakat***	**89,359,000**	***21 Lembaga/Organisasi Masyarakat***	***262,856,000***		
			7.01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*100 orang*	*100 orang*	85,890,000	*100 orang*	87,607,000	*100 orang*	89,359,000	*300 orang*	262,856,000		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendalmi		14/4 23
2.	Kasubag PK		14/4/2023
3	Kabid PBM		14/4 23
4.			
5.			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Wilangan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2024 sampai tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Wilangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Wilangan terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wilangan

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
1	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	69,09*	70	72	74	74

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Wilangan

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	78	82	84	86	86
2.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	N/A	80	82	84	84

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Wilangan ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001